

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Diplomasi sebagai instrumen utama dalam hubungan internasional telah memainkan peran yang krusial dalam mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara (Schelling, 2008). Hal ini terutama tampak dalam upaya meredam konflik tanpa harus menghadapi konsekuensi yang berat seperti perang. Namun, kendala-kendala seperti waktu yang terbatas dan situasi krisis seringkali mendorong negara-negara untuk mencari strategi yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, diplomasi koersif muncul sebagai alternatif yang menarik, memungkinkan negara-negara untuk mengupayakan tujuan politik luar negeri mereka dengan cara yang lebih terukur dan responsif terhadap dinamika global yang berkembang (Barston, 2013). Perkembangan dinamika konflik antarnegara dewasa ini menuntut adanya alternatif sarana negosiasi yang ideal serta efektif dalam meredam eskalasi konflik.

Teori diplomasi koersif mengacu pada upaya satu aktor internasional untuk memaksa aktor internasional lainnya untuk bertindak sesuai dengan keinginan yang tidak akan dipilih oleh aktor internasional kedua tersebut secara alami. Pendekatan ini melibatkan berbagai macam tindakan, mulai dari teguran hingga operasi militer, tergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Di sisi lain, kepentingan nasional menjadi faktor penting dalam strategi diplomasi koersif, dimana negara-negara berusaha untuk memastikan bahwa tindakan koersif yang diambil sejalan dengan kepentingan nasional mereka, baik dari segi keamanan maupun kepentingan

ekonomi dan politik (George, 1971). Dalam era interdependensi global dan kompleksitas geopolitik kontemporer, diplomasi telah menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan situasional yang berkembang secara dinamis.

Penggunaan teori diplomasi koersif dan konsep kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri adalah aspek krusial yang memerlukan analisis mendalam. Schelling (2008) menyoroti peran esensial teori koersif sebagai alat efektif dalam memaksa negara lain berubah sesuai keinginan, sedangkan Barston (2013) menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan nasional dalam merumuskan strategi diplomatik. Analisis ini penting karena mencerminkan dinamika kompleks geopolitik modern dan membutuhkan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan diplomasi global. Pendekatan ini memiliki kepentingan yang sangat besar dalam upaya pencegahan proliferasi senjata nuklir dan penyelesaian konflik global, mengingat perlunya strategi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi dalam diplomasi global.

Dinamika konflik internasional menunjukkan bahwa proliferasi senjata nuklir merupakan ancaman serius bagi stabilitas global. Salah satu langkah konkret yang diambil untuk mengatasi hal ini adalah melalui *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yang disepakati antara Iran dan P5+1 pada tahun 2015. Meskipun JCPOA memiliki tujuan non-proliferasi nuklir yang penting, penilaian terhadap implementasinya menunjukkan serangkaian kegagalan yang mengkhawatirkan. Misalnya, data dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA) menunjukkan bahwa Iran telah melampaui batasan stok uranium diperkaya yang ditetapkan dalam

JCPOA, mengindikasikan kegagalan dalam mencapai tujuan non-proliferasi nuklir (IAEA, 2022).

Implementasi *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) sebagai upaya AS untuk menekan aktivitas negara-negara seperti Iran yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional belum selalu berhasil efektif dalam mencapai tujuan non-proliferasi nuklir. Data dari Congress.gov (2017) menunjukkan bahwa sanksi ekonomi tidak selalu mampu membatasi kemampuan Iran dalam mengembangkan program nuklirnya (Congress.gov., 2017). Fluktuasi kebijakan di bawah pemerintahan Trump juga memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi regional dan global, khususnya dalam konteks bisnis ke bisnis (B2B). Kegagalan dalam mengatasi proliferasi nuklir, terutama terkait dengan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan implementasi CAATSA, memiliki implikasi yang sangat luas dan serius. Data dari *International Atomic Energy Agency* menyoroti bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek keamanan internasional, tetapi juga berpotensi mempengaruhi ekonomi global melalui hubungan bisnis yang terganggu dan ketidakpastian investasi (IAEA, Safeguards Implementation Report for 2022, 2023).

Latar belakang kegagalan kebijakan CAATSA melibatkan serangkaian kompleksitas diplomatik dan ekonomi. CAATSA, yang disahkan pada tahun 2017, bertujuan untuk menekan Iran agar menghentikan program nuklir dan aktivitas militernya melalui sanksi ekonomi yang ketat. Namun, implementasi kebijakan ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan, sebaliknya malah memperburuk

hubungan antara Amerika Serikat dan Iran serta menimbulkan dampak negatif pada ekonomi global.

Kegagalan kebijakan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, CAATSA tidak berhasil mencegah Iran untuk terus mengembangkan program nuklirnya. Meskipun sanksi ekonomi yang diterapkan sangat keras, Iran tetap melanjutkan pengayaan uranium dan pengembangan teknologi nuklirnya. Data menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya CAATSA, Iran telah meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya lebih dari dua kali lipat (Johnston, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi ekonomi tidak cukup efektif untuk menekan negara yang memiliki motivasi kuat dalam mempertahankan program strategisnya.

Selain itu, penerapan CAATSA juga memicu reaksi negatif dari sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa. Banyak negara Eropa yang menolak untuk mengikuti kebijakan sanksi ini karena berdampak negatif pada perdagangan mereka dengan Iran. Uni Eropa bahkan menciptakan mekanisme khusus yang disebut INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) untuk memfasilitasi perdagangan dengan Iran tanpa menggunakan dolar Amerika, yang secara efektif menghindari sanksi CAATSA (Smith, 2020). Ketidaksepakatan ini menunjukkan adanya celah dalam solidaritas internasional yang diharapkan oleh Amerika Serikat untuk mendukung kebijakan sanksinya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan CAATSA juga berdampak pada peningkatan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Iran merespons sanksi tersebut dengan meningkatkan aktivitas militernya di kawasan, termasuk serangan terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi dan penangkapan kapal-

kapal tanker di Selat Hormuz. Data dari laporan Defense Intelligence Agency Amerika Serikat pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas militer Iran di kawasan tersebut setelah diberlakukannya CAATSA (DIA, 2020). Hal ini menegaskan bahwa sanksi ekonomi saja tidak mampu mengekang perilaku agresif negara yang merasa terancam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa diplomasi koersif pada kebijakan *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) gagal dalam mencapai tujuan pemberian sanksi terhadap Iran?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus:

### **1.3.1 Tujuan Penelitian Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis diplomasi koersif pada kebijakan *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) dengan penerapan teori *Analytical Framework: Coercive Diplomacy Success and Failure*

### **1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) terhadap Iran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep diplomasi koersif pada kebijakan *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) serta faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan CAATSA.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan CAATSA terhadap Iran sehingga dapat membantu memberikan rekomendasi atas kebijakan diplomasi koersif.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pertama yaitu jurnal "*Moving Beyond Coercive Diplomacy: A New Policy Approach Toward Iran's Nuclear Ambitions*" yang ditulis Brandon M. Boylan memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti implikasi diplomasi koersif terhadap proliferasi nuklir di Iran. Jurnal tersebut bertujuan untuk menguraikan suatu pendekatan baru yang lebih menjanjikan terhadap ambisi nuklir Iran, sejalan dengan fakta bahwa upaya diplomasi koersif yang telah dilakukan selama beberapa dekade tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pembahasan berfokus pada pembukaan Iran terhadap kerjasama dan negosiasi pada tahun 2009, jurnal ini mencoba untuk memberikan panduan baru bagi para pemangku kepentingan politik

Amerika Serikat dalam menyikapi isu proliferasi nuklir Iran. Di sisi lain, penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus CAATSA serta bagaimana diplomasi koersif gagal mencapai pemberian sanksi terhadap Iran pasca Amerika Serikat keluar dari JPCOA pada tahun 2018

Tinjauan pustaka kedua yang menjadi acuan mengutip disertasi Ebrahim Mohseni berjudul "*When Coercion Backfires: The Limits of Coercive Diplomacy in Iran*", penekanan diberikan pada analisis terperinci tentang batasan diplomasi koersif. Mohseni menyoroti bahwa ketika kondisi hubungan antarnegara tidak memungkinkan untuk terciptanya kepercayaan yang cukup di antara pihak-pihak yang terlibat, strategi diplomasi koersif cenderung menjadi tidak berhasil. Dalam konteks spesifiknya, yaitu hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, penekanan terus-menerus pada pendekatan diplomasi koersif oleh pihak Amerika, terutama melalui penerapan sanksi ekonomi sejak tahun 2002, telah memicu ketegangan yang menandai titik dimana diplomasi koersif mencapai batasnya. Keduanya sepakat bahwa dalam sistem internasional, dimana negara-negara didorong oleh kepentingan domestik dan keamanan sendiri, strategi koersif sering kali mendorong reaksi otonom yang dapat memperburuk ketegangan dan membuat pencapaian resolusi damai semakin sulit. Namun penelitian ini lebih berfokus pada kegagalan diplomasi koersif dalam konteks CAATSA dalam rangka mencapai tujuan pemberian sanksi di Iran.

Tinjauan Pustaka ketiga ditulis oleh Riccardo Alcaro berjudul "*All Is Not Quiet on the Western Front: Trump's Iran Policy and Europe's Choice on the*

*Nuclear Deal*" Dalam penelitiannya, Alcaro menyoroti dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Iran pasca perjanjian nuklir tahun 2015, yang dibandingkan dengan hubungan perdagangan yang lebih harmonis antara Eropa dan Iran. Namun, selama masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan luar negeri yang ditandai oleh antagonisme tradisional terhadap Iran. Alcaro berpendapat bahwa gaya kepemimpinan Trump menjadi salah satu pendorong utama di balik pendekatan ini. Kedua penelitian membahas kebijakan Trump terhadap Iran, namun penelitian ini lebih berfokus pada kegagalan CAATSA dalam mencapai tujuan pemberian sanksi terhadap Iran, sehingga tidak membahas kebijakan lain secara mendalam.

Tinjauan Pustaka keempat berjudul "The US Policy of Containing Iran: from Obama to Trump 2009-2019" oleh Ayman Saleh Albarasneh dan Dania Koleilat Khatib, diterbitkan pada 14 Desember 2019, memberikan analisis komprehensif tentang kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran selama periode 2009-2018. Penelitian ini mengkaji berbagai faktor dan variabel yang mempengaruhi kebijakan AS terhadap Iran di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump. Selain itu, tulisan ini menguraikan pendekatan yang diambil oleh kedua presiden dalam membatasi kemajuan program nuklir Iran. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh Obama dan Trump terkait isu nuklir Iran selama periode tersebut. Sehingga terdapat perbedaan pada fokus penelitian dimana penelitian ini tidak berfokus pada perbandingan kebijakan Trump dan Obama melainkan lebih



menyoroti kebijakan Trump khususnya CAATSA serta implikasinya terhadap pemberian sanksi terhadap Iran.

Tinjauan pustaka kelima yaitu sebuah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Hendra Maujana Saragih pada tahun 2020, dibahas mengenai "Posisi Republik Islam Iran Dalam Program Nuklir Dalam Perspektif AS". Analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif mengungkapkan pandangan AS yang menganggap pengembangan nuklir oleh Iran sebagai ancaman serius bagi keamanan dunia dan sekutu-sekutu AS di kawasan. Meskipun kesepakatan JCPOA telah disepakati pada waktu itu, kebijakan luar negeri AS cenderung "*outward looking*", dan persepsi ini dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan antara partai Republik dan Demokrat, meskipun keduanya memiliki tujuan keselamatan dan kepentingan yang sama. Penelitian tersebut menitikberatkan pada faktor-faktor pendorong Amerika Serikat dalam memandang pengembangan nuklir, sehingga walaupun memiliki subjek yang sama terdapat perbedaan pengerucutan dimana penelitian yang peneliti lakukan berfokus kepada konsep diplomasi koersif dalam konteks proliferasi nuklir Iran.

Penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika dan efektivitas diplomasi koersif, khususnya dalam konteks penerapan sanksi ekonomi terhadap negara yang memiliki kapasitas resistensi tinggi seperti Iran. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi kembali strategi diplomasi koersif yang digunakan oleh negara-negara besar dalam menghadapi tantangan global saat ini. Keunikan penelitian ini terletak pada

pendekatan kritis yang mengkaji CAATSA tidak hanya dari perspektif kebijakan luar negeri AS, tetapi juga dari sudut pandang Iran dan dinamika internasional yang lebih luas.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada analisis teknis dan ekonomi dari sanksi, penelitian ini mengintegrasikan perspektif geopolitik, ekonomi, dan politik internal untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang mengapa CAATSA gagal mencapai tujuannya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya diplomasi multilateral yang koheren dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam penggunaan sanksi ekonomi.

Penelitian ini menonjolkan urgensi dari perubahan pendekatan dalam diplomasi koersif, mengingat perubahan dinamis dalam politik global dan distribusi kekuatan ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian ini mengusulkan bahwa diplomasi koersif tidak dapat berhasil tanpa dukungan internasional yang kuat dan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika negara target. Penelitian ini berfokus pada penggabungan analisis teoritis dengan studi kasus yang mendalam, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sanksi ekonomi sebagai alat diplomasi.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

### **1.6.1 Strategic Theory**

Teori strategi (*strategic theory*) merupakan sebuah paradigma yang mendalam dan multifaset yang menggabungkan berbagai aspek tujuan, cara, dan sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks hubungan

internasional dan studi militer. Secara umum, teori strategi melibatkan kalkulasi yang cermat dari tujuan, konsep, dan sumber daya yang tersedia dalam batas risiko yang dapat diterima. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meraih hasil yang lebih menguntungkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang ada (Smith & Stone, 2011). Dengan fokus pada tujuan, cara, dan sarana, teori strategi memberikan kerangka kerja untuk merumuskan dan mengevaluasi efektivitas strategi dalam berbagai situasi konflik.

Teori strategi berasumsi bahwa pengambilan keputusan strategis sangat bergantung pada situasi dari lawan yang dihadapi. Oleh karena itu, efektivitas strategi bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan pada pihak lawan (Caliskan, 2019). Lebih jauh, teori strategi mengasumsikan adanya aktor rasional yang menunjukkan perilaku konsisten terhadap misi dan tujuan yang ingin dicapai (Smith & Stone, 2011). Rasionalitas dalam konteks ini mencakup konsistensi, logika, dan efisiensi dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Pada level negara, strategi adalah seni dalam mengembangkan serta menggunakan instrumen kekuatan nasional seperti kekuatan politik, ekonomi, sosial-psikologis, dan militer untuk melindungi atau mendukung kepentingan nasional sesuai dengan situasi yang dihadapi (Yarger, 2006). Ini mencakup berbagai dimensi kekuatan yang dapat digunakan secara sinergis untuk mencapai tujuan nasional. Penting untuk dicatat bahwa aktor yang dapat menerapkan konsep ini tidak terbatas pada negara saja. Entitas lain seperti kelompok teroris atau kelompok revolusioner separatis juga bisa menjadi aktor rasional dalam kajian teori strategi

ini (Doeser & Frantzen, 2020). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan luasnya cakupan teori strategi dalam menganalisis berbagai bentuk konflik dan aktor.

Untuk mengukur efektivitas strategi dalam menghadapi situasi konflik, pendekatan yang digunakan sering kali mengacu pada konsep teori strategi dan pemikiran ahli-ahli di bidang tersebut. Misalnya, Sun Tzu dalam karyanya yang terkenal "The Art of War" berargumen bahwa efektivitas strategi konflik dapat dicapai melalui beberapa tahapan penting. Pertama, aktor harus melakukan analisis terhadap strategi lawan terlebih dahulu. Analisis ini mencakup pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan lawan, serta konteks di mana lawan beroperasi. Kedua, aktor perlu menemukan titik lemah dari strategi lawan. Identifikasi titik lemah ini memerlukan intelijen yang akurat dan analisis yang tajam. Ketiga, aktor dapat menerapkan strategi tandingan yang dianggap tepat untuk mengeksploitasi kelemahan lawan tersebut. Dengan kata lain, strategi yang dipilih harus bersifat kontra-strategis terhadap strategi lawan (Meiser et al., 2021). Sun Tzu juga menekankan pentingnya aspek psikologis dalam strategi, yaitu menyerang dan memanipulasi psikologi lawan untuk menciptakan kebingungan dan ketidakpastian.

Selain Sun Tzu, Clausewitz juga memberikan kontribusi signifikan dalam teori strategi. Menurut Clausewitz, strategi dianggap efektif jika aktor berhasil menetapkan sejak awal tipe perang apa yang ingin mereka mulai. Penetapan tipe perang ini sangat penting karena dengan mengontrol pola perang, aktor dapat memanipulasi pusat gravitasi dari perang tersebut untuk keuntungan mereka (Meiser et al., 2021). Clausewitz menekankan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain, sehingga tujuan politik harus selalu menjadi panduan

utama dalam strategi militer. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konteks politik dan tujuan strategis adalah kunci untuk merumuskan strategi yang efektif.

M.L.R. Smith memberikan pandangan yang memperkuat pemikiran para ahli sebelumnya dengan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh aktor. Smith berpendapat bahwa untuk memenuhi kriteria efektivitas dalam strategi, aktor perlu memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki dan menyelaraskannya dengan situasi yang dihadapi (Smith & Stone, 2011). Ini berarti bahwa efektivitas strategi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan aktor untuk menyesuaikan dan mengintegrasikan sumber daya tersebut dalam konteks strategis yang dinamis. Selain itu, Smith menekankan bahwa strategi yang efektif harus fleksibel dan adaptif, mampu merespons perubahan situasi dengan cepat dan tepat.

Melihat dari sudut pandang para ahli teori strategi di atas, konsep efektivitas dalam strategi dapat disimpulkan sebagai berikut: Efektivitas strategi dapat dipenuhi dengan memastikan apa target yang ingin dicapai dalam menghadapi situasi konflik, mempelajari situasi yang akan dihadapi, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, menyelaraskan antara situasi konflik dengan sumber daya yang dibutuhkan, dan memformulasikan penyelarasan tersebut menjadi kebijakan strategis. Jika poin-poin ini terpenuhi dan aktor berhasil mencapai kepentingan utamanya dalam konflik, maka strategi tersebut dapat dikatakan efektif (Nielson et al., 2008).

Analisis kritis terhadap teori strategi menunjukkan bahwa meskipun teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan merumuskan strategi, ada beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, asumsi tentang rasionalitas aktor sering kali dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak keputusan strategis dipengaruhi oleh faktor-faktor irasional seperti emosi, bias, dan tekanan politik domestik. Kedua, dinamika konflik dan kompleksitas lingkungan strategis sering kali membuat prediksi tentang efektivitas strategi menjadi sangat sulit. Ketiga, teori strategi tradisional cenderung berfokus pada aktor negara dan konflik konvensional, sementara konflik modern sering kali melibatkan aktor non-negara dan bentuk-bentuk perang yang tidak konvensional. Selain itu, teori strategi harus terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan dalam teknologi, globalisasi, dan dinamika kekuasaan global. Misalnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara perang dan strategi dijalankan, dengan meningkatnya peran perang siber dan operasi informasi. Globalisasi juga telah menciptakan interdependensi yang kompleks di antara negara-negara, yang mempengaruhi kalkulasi strategis dan pilihan kebijakan.

Dalam konteks ini, teori strategi perlu mengintegrasikan pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dan relevan terhadap tantangan strategis kontemporer. Hal ini memerlukan kerjasama antara ahli strategi, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika konflik dan strategi.

### 1.6.2 Teori Diplomasi Koersif

Diplomasi koersif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Alexander L. George dalam bukunya *The Limits of Coercive Diplomacy* (1971), merupakan suatu pendekatan yang melibatkan penggunaan tekanan atau pemaksaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hubungan internasional. George menyatakan bahwa diplomasi koersif menggabungkan elemen ancaman dan pemaksaan untuk mempengaruhi perilaku negara target. Dalam konteks ini, diplomasi koersif bertujuan untuk mengubah kebijakan atau perilaku negara target dengan menggunakan ancaman sanksi atau tindakan keras sebagai alat utama dalam negosiasi. Hal ini sejalan dengan konsep kompilasi yang diperkenalkan oleh Thomas Schelling dalam karyanya *Arms and Influence* (1966), dimana Schelling menekankan pentingnya penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan yang proporsional sebagai strategi untuk mempengaruhi keputusan lawan. Pendekatan ini menempatkan diplomasi koersif di antara spektrum antara diplomasi yang kooperatif dan kebijakan yang menggunakan kekuatan militer secara langsung.

Strategi diplomasi koersif melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk memperkuat tekanan terhadap negara target dan mendorong perubahan perilaku. Menurut George (1971), terdapat beberapa elemen kunci yang membentuk strategi diplomasi koersif. Pertama, terdapat unsur permintaan yang jelas dan spesifik yang diajukan kepada negara target. Permintaan ini haruslah rasional dan beralasan, serta didukung oleh alasan-alasan yang kuat dari perspektif negara pengancam. Kedua, terdapat unsur ancaman yang melekat pada strategi ini. Ancaman dapat berupa sanksi ekonomi, isolasi politik, atau bahkan ancaman

penggunaan kekuatan militer jika diperlukan. Ancaman tersebut haruslah proporsional dan dipertimbangkan secara cermat agar memberikan insentif yang cukup bagi negara target untuk merespons tuntutan yang diajukan (George A. L., 1971).

Salah satu aspek penting dari diplomasi koersif adalah penggunaan tekanan waktu sebagai alat untuk mempercepat respons dari negara target. George (1971) menyoroti pentingnya menetapkan batas waktu atau deadline bagi negara target untuk mematuhi permintaan yang diajukan. Tekanan waktu ini menciptakan urgensi dan memperkuat kredibilitas ancaman yang disampaikan oleh negara pengancam. Selain itu, tekanan waktu juga membantu mencegah negara target untuk melakukan taktik penundaan atau manipulasi dalam merespons tuntutan yang diajukan (George A. L., 1971).

George (1971) juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan politis dalam merancang strategi diplomasi koersif. Hal ini termasuk reputasi negara pengancam dalam menerapkan ancaman atau sanksi, serta dukungan publik internasional terhadap langkah-langkah yang diambil. Kepercayaan dan kredibilitas negara pengancam sangatlah penting dalam memastikan efektivitas dari diplomasi koersif. Ancaman atau tuntutan yang tidak didukung oleh reputasi yang kuat atau konsensus internasional mungkin tidak akan berhasil mempengaruhi negara target (George A. L., 1971).

Diplomasi koersif merupakan suatu pendekatan yang dikenal dalam hubungan internasional dimana negara-negara menggunakan kombinasi dari



ancaman, tawar-menawar, dan negosiasi untuk memengaruhi perilaku negara lain sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kerangka diplomasi koersif, George mengidentifikasi tiga variabel utama yang harus diperhatikan oleh negara pengirim agar usahanya berhasil: tuntutan yang jelas, ancaman yang kredibel, dan batas waktu yang mengikat.

Tuntutan yang jelas merupakan langkah awal dalam diplomasi koersif. Negara pengirim harus dengan tegas menetapkan apa yang mereka inginkan dari negara sasaran. Tuntutan ini haruslah dipertimbangkan dengan cermat, karena kejelasan dan kredibilitasnya mempengaruhi respons negara sasaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Tom Sauer (2007), tuntutan tersebut juga harus sesuai dengan norma-norma hukum internasional untuk mendapatkan legitimasi yang lebih besar. Dengan kata lain, tuntutan yang diungkapkan haruslah berada dalam batas-batas yang diakui secara universal oleh komunitas internasional (Sauer, 2007).

Ancaman merupakan bagian integral dari diplomasi koersif. Ancaman yang tepat dan kredibel dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan upaya diplomasi tersebut. Namun, ancaman yang tidak kredibel atau berlebihan dapat merusak upaya tersebut dan bahkan memperkuat posisi negara sasaran. Oleh karena itu, penting bagi negara pengirim untuk memastikan bahwa ancaman yang mereka sampaikan sesuai dengan tuntutan yang telah mereka buat dan mencerminkan reputasi mereka dalam melakukan diplomasi koersif sebelumnya.

Batas waktu merupakan faktor penentu dalam kesuksesan diplomasi koersif. Negara pengirim haruslah memberikan batas waktu yang jelas dan realistis bagi

negara sasaran untuk mematuhi tuntutan mereka. Batas waktu yang terlalu longgar dapat mengurangi urgensi bagi negara sasaran untuk bertindak, sementara batas waktu yang terlalu singkat dapat membuat negara sasaran merasa terdesak secara tidak adil. Oleh karena itu, penentuan batas waktu yang tepat menjadi kunci dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam diplomasi koersif.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konsep diplomasi koersif dan penerapan ketiga variabel tersebut dengan cermat, negara-negara dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan-tujuan mereka dalam hubungan internasional. Studi kasus yang menarik untuk dianalisis dalam konteks ini adalah *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Meskipun dikembangkan sebagai instrumen untuk menekan program nuklir Iran, kegagalan dalam penerapan tuntutan yang jelas, ancaman yang kredibel, dan batas waktu yang tepat dapat menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut.

### **1.7 Hipotesis**

Penelitian ini berargumen bahwa penerapan diplomasi koersif melalui kebijakan CAATSA terhadap Iran, berdasarkan teori diplomasi koersif dan konsep kepentingan nasional, gagal mencapai tujuan proliferasi nuklir. Diplomasi koersif AS, yang mengandalkan tekanan ekonomi dan politik melalui sanksi untuk membatasi kemampuan nuklir Iran, tidak berhasil memenuhi harapan. Meskipun didukung oleh kepentingan keamanan nasional AS dan keinginan untuk

mengurangi pengaruh Iran di kawasan, upaya diplomatik tersebut tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Program nuklir Iran tetap berlanjut tanpa banyak gangguan, menunjukkan kegagalan CAATSA dalam meredam ambisi nuklir Iran. Oleh karena itu, kebijakan koersif melalui CAATSA tidak efektif dalam mencapai tujuan pemberian sanksi terhadap Iran, menyoroti perlunya peninjauan kembali strategi diplomatik AS dalam menghadapi tantangan keamanan regional yang kompleks.

## **1.8 Operasionalisasi Konsep**

### **1.8.1 Definisi Konseptual**

#### **1.8.1.1 Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional merupakan prinsip yang mendominasi dalam studi hubungan internasional, memperkuat kerangka kerja analisis terhadap perilaku negara di panggung global. Sebagian besar analisis dalam bidang ini tidak terlepas dari pembahasan tentang kepentingan nasional. Dalam perspektif ini, kepentingan nasional mencakup sejumlah elemen esensial yang menentukan arah dan prioritas suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain dalam konteks internasional. Penelusuran kepentingan nasional melibatkan pemahaman mendalam terhadap dinamika politik, ekonomi, keamanan, dan nilai-nilai yang menjadi landasan identitas suatu negara. Dengan demikian, konsep ini bukan sekadar kerangka analisis, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, kepentingan nasional menjadi titik tolak yang krusial bagi negara-negara

untuk menjaga kedaulatan, keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan kepentingan strategis lainnya.

Konsep kepentingan nasional juga menyoroti dinamika kompleks dalam hubungan internasional, dimana setiap negara cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri. Ini menciptakan dinamika dimana kesepakatan internasional seringkali bersifat bersyarat, dengan negara-negara hanya mematuhi perjanjian sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing. Pandangan ini diperkuat oleh Jackson & Sorensen (2013), yang menunjukkan bahwa dalam situasi dimana kepentingan suatu negara terancam, peraturan dan kesepakatan internasional dapat dikesampingkan demi kepentingan nasional (Jackson, 2013).

Nuechterlein (1976) menambahkan dimensi baru dalam pemahaman kepentingan nasional dengan membedakan antara lingkungan eksternal dan internal suatu negara. Lingkungan eksternal mencakup pengaruh dari sistem dunia internasional, sementara lingkungan internal mengacu pada kepentingan umum masyarakat dalam negara tersebut. Dengan demikian, kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh dinamika internal yang berkembang (Nuechterlein, 1976).

Secara keseluruhan, pemahaman yang komprehensif mengenai kepentingan nasional mengakui kompleksitas dan dinamika yang melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Para ahli telah memberikan kontribusi penting dalam merumuskan konsep ini, yang

menjadi landasan penting dalam analisis hubungan internasional dan pembentukan kebijakan luar negeri secara global.

### **1.8.1.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri merupakan konsep dalam studi hubungan internasional yang melibatkan analisis kompleks terhadap interaksi antara faktor eksternal dan internal dalam suatu negara. Dalam pemahaman sistem kebijakan luar negeri, respon dari lingkungan eksternal dan domestik dianggap sebagai input yang membentuk keputusan yang dihasilkan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi ini melibatkan langkah-langkah seperti penyelidikan, penentuan prioritas tujuan, dan penilaian persetujuan. Dalam konteks ini, sifat multifaktor dan multilevel dari proses kebijakan luar negeri menunjukkan bahwa penjelasan dan pertimbangan kebijakan melibatkan berbagai variabel dan dapat dianalisis dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat individu hingga sistem internasional.

Pada tingkat sistem, kondisi internasional yang dikenal sebagai anarki menyebabkan negara-negara melakukan tindakan untuk mengamankan diri mereka sendiri. Dalam analisis sistem, negara-negara cenderung meningkatkan kapabilitas mereka, tetapi lebih suka bernegosiasi daripada bertengkar, atau bahkan menentang aktor atau koalisi yang berusaha mengungguli di dalam sistem. Di sini, pemahaman bahwa semua aktor politik cenderung tidak puas dengan status quo pada beberapa isu, sementara yang lain berusaha mempertahankannya, menjadi penting dalam memahami konteks kebijakan luar negeri.

Palmer dan Morgan (2006: 21) menegaskan bahwa kebijakan luar negeri pertama kali bernilai untuk menghasilkan perubahan, dan kedua untuk mempertahankan status quo (Palmer, 2006). Dalam hal ini, kebijakan luar negeri suatu negara dirancang untuk mengubah atau mempertahankan tatanan politik internasional sesuai dengan kepentingan dan aspirasi nasional. Holsti, seperti yang dikutip dalam Jervis (2005: 19), menggambarkan kebijakan luar negeri sebagai aksi suatu negara terhadap lingkungannya, yang diformulasikan dari kepentingan internasional, kapabilitas, pembuat kebijakan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat (Jervis, 2005).

Rossenau, dalam konsep yang dikemukakan oleh Perwita dan Yani (2005: 53-55), menggambarkan kebijakan luar negeri sebagai seperangkat orientasi, strategi atau rencana komitmen untuk bertindak, dan perilaku (Perwita, 2005). Ini berarti kebijakan luar negeri merupakan hasil dari nilai-nilai, strategi, dan tindakan konkret yang diambil oleh negara. Dalam konteks ini, Modelski, seperti yang dikutip dalam Dugis (2007), memandang kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem kegiatan yang dirumuskan dengan prinsip-prinsip tertentu dan tujuan tertentu.

Breuning (2007) menyoroti pentingnya analisis pada tiga level: individual, negara, dan sistem, dalam memahami kebijakan luar negeri secara komprehensif. Metode perbandingan kebijakan luar negeri digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan tersebut dibuat, mengapa keputusan dibuat, dan bagaimana negara-negara berinteraksi dalam sistem internasional. Penelitian tentang kebijakan luar negeri bertujuan untuk

mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai latar belakang pembuatan keputusan, perilaku kebijakan, dan implikasi mengenai interaksi antar negara dalam sistem internasional.

## **1.8.2 Definisi Operasional**

### **1.8.2.1 Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional menjadi fokus penting dalam analisis hubungan antar negara dan kebijakan luar negeri. Berbagai pemikiran dari para ahli seperti Luke Glanville, Hans J. Morgenthau, Scott Burchill, serta Donald E. Nuechterlein telah memberikan sumbangan penting dalam memahami esensi dan aplikasi konsep ini. Menurut Glanville (2005), kepentingan nasional menjadi landasan utama bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara, menegaskan bahwa setiap entitas negara memiliki kepentingan yang harus diutamakan dalam proses pengambilan keputusan. Morgenthau (1951) menggambarkan kepentingan nasional sebagai kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan eksternal. Sementara itu, Bruchil (2005) menyoroti dua dimensi penggunaan konsep kepentingan nasional, baik sebagai dasar untuk menjelaskan dan menentang kebijakan luar negeri, maupun sebagai alat untuk menganalisis perilaku negara dalam konteks urusan internasional.

Kepentingan nasional menyoroti dominasi prioritas internal AS dalam pembentukan kebijakan luar negeri, dimana faktor-faktor seperti keamanan domestik, politik domestik, dan kepentingan ekonomi memainkan peran kunci dalam menentukan arah dan sifat kebijakan luar negeri AS terhadap Iran. Hal ini

mengakibatkan pembentukan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan politik domestik, daripada pertimbangan jangka panjang yang lebih luas mengenai efektivitas dan dampak kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan strategis AS di tingkat global.

Dalam konteks diplomasi koersif, dimana CAATSA merupakan instrumen utama dalam menekan Iran, implikasi dari konsep kepentingan nasional adalah bahwa AS cenderung lebih fokus pada penegakan kebijakan tersebut untuk memperkuat posisi keamanan nasional mereka, daripada pada kemungkinan konsekuensi dan dampak yang lebih luas dari kebijakan tersebut terhadap stabilitas regional dan dinamika keamanan global. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan luar negeri AS terhadap Iran, kepentingan nasional AS seringkali menjadi prioritas utama yang mengarah pada kebijakan yang mungkin kurang memperhatikan implikasi jangka panjang dan kompleksitas dinamika regional dan internasional.

#### **1.8.2.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian langkah dan keputusan yang diambil oleh suatu negara dalam mengatur interaksi dan hubungannya dengan negara lain di arena internasional (Holsti, 2005). Ini mencakup strategi, tindakan, dan kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan nasional negara tersebut di tingkat global atau regional.

Secara khusus, analisis difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui CAATSA sebagai respons terhadap kebijakan dan perilaku Iran. CAATSA, yang merupakan instrumen diplomasi koersif, diterapkan



untuk menanggapi berbagai isu yang melibatkan Iran, termasuk program nuklirnya dan aktivitas regional serta globalnya yang dianggap mengancam kepentingan keamanan nasional AS.

Implementasi dari kebijakan luar negeri ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk proses perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor di tingkat eksekutif dan legislatif AS. Langkah-langkah ini juga mencakup analisis intelijen, diskusi dengan sekutu dan mitra internasional, serta penentuan keputusan akhir terkait penerapan sanksi ekonomi terhadap Iran.

Implikasi dari kebijakan luar negeri ini sangat luas dan bervariasi. Secara langsung, sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh CAATSA dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas politik Iran. Namun, lebih dari itu, kebijakan ini juga memiliki implikasi diplomatik yang kompleks, mempengaruhi hubungan AS dengan negara-negara lain di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Selain itu, respons yang mungkin diberikan oleh Iran terhadap kebijakan ini juga dapat memicu ketegangan regional yang lebih besar atau bahkan konflik yang lebih luas di tingkat internasional.

## **1.9 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menampilkan data tentang strategi Interpol dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan transnasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti memfokuskan penelitian pada analisa data non numerik serta tanpa rumus-rumus statistik dalam pendekatannya. Metode penelitian kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pendekatan yang digunakan dimaksudkan guna mendeskripsikan situasi yang dipandang relevan secara objektif dan faktual. Pendekatan ini dinilai relevan dengan topik pembahasan karena mampu menjabarkan secara terperinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan diplomasi koersif dalam konteks kebijakan CAATSA terhadap Iran.

### **1.9.1 Jangkauan Penelitian**

#### **1.9.1.1 Batasan Ruang**

Penelitian ini memfokuskan pada analisis kegagalan diplomasi koersif dengan menggunakan studi kasus kebijakan CAATSA terhadap Iran. Jadi, fokus penelitian ini terbatas pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran dalam konteks CAATSA dan proliferasi nuklir Iran.

#### **1.9.1.2 Batasan Waktu**

Penelitian ini memiliki batasan waktu yang spesifik terkait dengan periode penelitian. Waktu penelitian ini terbatas pada periode tertentu yang dijadikan fokus dalam menganalisis diplomasi koersif yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui kebijakan CAATSA. Batasan waktu tersebut dapat mencakup periode tertentu di masa lalu atau saat penelitian dilakukan.

### **1.9.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh peneliti melalui studi pustaka (*library*

*research*) dimana sumbernya berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan multimedia. John W. Creswell menyatakan bahwa pengumpulan data sekunder merupakan pendekatan yang paling ideal dalam penelitian ilmu sosial karena peneliti dapat memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan diharuskan bersikap kritis dalam menanggapi dinamika yang ada (Creswell, 2007). Untuk memperdalam pemahaman mengenai diplomasi koersif dan dampak kebijakan CAATSA terhadap Iran, analisis didasarkan pada literatur dari jurnal akademis laporan dan publikasi pemerintah, serta seminar dari lembaga riset kebijakan luar negeri juga turut menyumbangkan wawasan yang signifikan.

Data tambahan juga dapat ditemukan melalui jurnal-jurnal internasional yang dipublikasikan melalui platform online seperti SCOPUS, JSTOR, Research Gate, DOAJ, ScienceDirect, dan Microsoft Academic. Selain informasi yang diberikan oleh negara-negara terlibat melalui publikasi resmi, penelitian dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal tersebut juga memberikan sumbangan penting dalam memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik ini.

### **1.9.3 Metode Analisis Data**

Setelah berhasil mengumpulkan data yang relevan, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah proses pengolahan data. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber harus melalui tahapan analisis yang sistematis untuk membentuk pemahaman yang mendalam mengenai implementasi diplomasi koersif dalam kebijakan CAATSA terhadap Iran, dengan mempertimbangkan aspek kepentingan

nasional yang mendasari tindakan negara-negara terlibat. Proses pengolahan data mencakup pengelompokkan, penyusunan, dan penggabungan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Tahap awal dalam proses pengolahan data adalah pengklasifikasian. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan relevansi dengan konteks penelitian, dengan fokus pada interaksi diplomatik terkait pelaksanaan CAATSA terhadap Iran. Pengklasifikasian data membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan strategi diplomasi koersif yang digunakan oleh negara-negara penerap sanksi.

Setelah data berhasil diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam berbagai format yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data disajikan dalam bentuk naratif, diagram, dan tabel, yang masing-masing memiliki kegunaan tertentu dalam menggambarkan interaksi diplomatik dan dampak kebijakan sanksi terhadap Iran. Data naratif memberikan penjelasan yang mendalam tentang fenomena yang diamati, sementara data visual seperti diagram dan tabel digunakan untuk memperjelas pola dan hubungan antarvariabel.

Setelah data berhasil disajikan, tahap terakhir dalam proses analisis adalah penarikan kesimpulan. Dengan memperhatikan teori diplomasi koersif dan kepentingan nasional, kesimpulan ditarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas dan implikasi diplomasi koersif dalam konteks kebijakan sanksi terhadap Iran, serta untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kepentingan nasional dari negara-negara yang

menerapkannya. Dengan demikian, proses analisis data ini memberikan kontribusi signifikan dalam menyajikan temuan yang relevan dan mendukung dalam konteks diplomasi koersif dan kebijakan luar negeri.

#### **1.9.4 Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Bagian pendahuluan yang berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, serta Metode Penelitian

**BAB II** : Menjelaskan hubungan AS-Iran dan kebijakan AS terdahulu terkait dengan Iran, terutama dalam konteks proliferasi nuklir. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan landasan perbandingan dengan kebijakan terdahulu.

**BAB III** : Menganalisis kegagalan kebijakan CAATSA dalam mencapai tujuan diplomasi koersif terhadap Iran dengan memanfaatkan teori diplomasi koersif. Penelitian mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek kebijakan CAATSA yang tidak berhasil dalam menekan proliferasi nuklir Iran.

**BAB IV** : Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran